

**FUNGSI KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DESA DALAM
PENANGANAN LINGKUNGAN KUMUH DI DESA PAGAR
MERBAU I KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

**CHALIZAH SAPITRA
228510011**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2026

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)10/8/26

**FUNGSI KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DESA DALAM
PENANGANAN LINGKUNGAN KUMUH DI DESA PAGAR MERBAU I
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di Fakultas
Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area

Oleh:

CHALIZAH SAPITRA

228510011

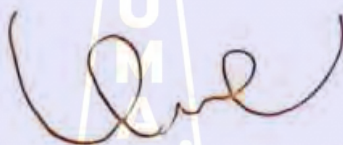
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA CHALIZAH SAPITRA
NPM 228510011
JUDUL FUNGSI KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DESA DALAM
PENANGANAN LINGKUNGAN KUMUH DI DESA PAGAR
MERBAU 1 KECAMATAN PAGAR MERBAU KABUPATEN
DELI SERDANG

Disetujui oleh,

Pembimbing



Dr. Evi Yunita Komiaty, S.Sos. M.IP

Tanggal Catatan 12 Mei 2026

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Lubis M.IP
Tangal: 19 Mei 2026

Koordinator Program Studi


Evi Yunita Komiaty, S.IP M.AP
Tangal: 19 Mei 2026

HALAMAN PERNYATAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan standart, prinsip, dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiarisme pada skripsi saya, saya bersedia menerima sanksi berupa pencaputan gelar akademik saya serta sanksi tambahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 13 April
2026



Chalizah Sapitra
Chalizah Sapitra

228510011

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : Chalizah Sapitra

NPM : 228510011

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis karya: Skripsi

Demi kepentingan memajukan ilmu pemerintahan, setuju untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul: Fungsi Komunikasi Pemerintahan Desa Dalam Penanganan Lingkungan Kumuh di Desa Pagar Merbau I Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.

Beserta dengan perangkat yang ada (jika diperlukan), Universitas Medan Area mempunyai hak bebas royalti non-eksklusif untuk menyimpan, mengirimkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), memelihara, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan sebagai hak cipta. Oleh karena itu, saya membuat pernyataan ini dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal April
2026

Yang menyatakan


(Chalizah Sapitara)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/8/26

ABSTRAK

Permasalahan lingkungan kumuh tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga mulai berkembang di kawasan pedesaan, termasuk di Desa Pagar Merbau I, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, yang ditandai dengan buruknya sistem drainase, pengelolaan sampah yang belum memadai, kepadatan permukiman, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sehingga memerlukan peran aktif pemerintah desa; penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, serta warga Dusun I, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan; hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi komunikasi pemerintahan desa telah dijalankan melalui fungsi informatif, edukatif, dan persuasif seperti penyampaian informasi program kebersihan, ajakan gotong royong, serta sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan, namun pelaksanaannya belum optimal karena adanya hambatan berupa belum maksimalnya penerapan fungsi rekreatif, keterbatasan anggaran kegiatan rekreatif-edukatif, dominannya pendekatan komunikasi formal, serta rendahnya minat dan partisipasi masyarakat, sehingga disimpulkan bahwa diperlukan penguatan strategi komunikasi pemerintahan desa yang lebih inovatif, kreatif, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan pendekatan rekreatif secara konsisten agar penanganan lingkungan kumuh di tingkat desa dapat berjalan lebih efektif.

Kata kunci: komunikasi, lingkungan kumuh, partisipasi

ABSTRACT

The problem of slum environments does not only occur in urban areas but has also begun to develop in rural areas, including Pagar Merbau I Village, Pagar Merbau Subdistrict, Deli Serdang Regency, which is characterized by poor drainage systems, inadequate waste management, dense settlements, and low public awareness of environmental cleanliness, thereby requiring an active role from the village government; this study uses a qualitative method with a descriptive approach, with data collected through interviews, observations, and documentation involving informants such as the village head, village officials, hamlet heads, community leaders, and residents of Hamlet I, and analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing; the results show that the village government communication functions have been implemented through informative, educative, and persuasive approaches, such as delivering information on cleanliness programs, encouraging mutual cooperation, and socializing the importance of maintaining the environment, however, their implementation has not been optimal due to obstacles such as the lack of application of recreational functions, limited budget for recreational-educative activities, the dominance of formal communication approaches, and low community interest and participation, therefore it is concluded that strengthening village government communication strategies that are more innovative, creative, and sustainable by consistently integrating recreational approaches is needed so that the handling of slum environments at the village level can be more effective.

Key Word: communication, slum areas, participati

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul **“Fungsi komunikasi pemerintahan desa dalam penanganan Lingkungan Kumuh di Desa Pagar Merbau I Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan juga nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.SC selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Yurial Arief Lubis, S.Sos.,M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Amas Mashudin, S.IP, M.AP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan masukan maupun nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Evi Yunita Kurniaty S.Sos, M.I.P selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan, serta arahan yang sangat berarti sejak tahap awal penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Untuk panutan dan penyemangatku, Bapak Lilik Suryadi, terimakasih yang teramat sudah selalu berjuang tanpa kenal Lelah dan menyerah demi

mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis.

6. Untuk mamak yang tercinta, mamak Nani Agustini yang menjadi salah satu alasan utama penulis bertahan sampai saat ini. Terimakasih yang beribu atas segala motivasi, harapan, semangat, serta cinta. Terimakasih telah bersedia menjadi sandaran terkuat dari segala kerasnya dunia, terimakasih juga karena tidak pernah menuntut akan segala hal dan bahkan senantiasa mendampingi setiap Langkah penulis untuk menjadi seseorang yang berpendidikan. Terimakasih atas kasih sayang yang tidak terhingga yang diberikan, yang telah mendoakan tanpa henti dan terimakasih atas kesabaran dan segala pengorbanan yang selalu mengiringi Langkah penulis. Beliau Adalah Wanita terhebat yang tidak banya mengeluh dan sangat pandai menyembunyikan lukanya ssendirian. Dan beliau lah satu satunya sumber kekuatan dan inspirasi penulis, sekali lagi terimakasih banya untuk segala pengorbanan moral maupun financial.
7. Terimakasih untuk seluruh saudara saudara penulis yang telah menjadi bagian dari penyemangat penulis, penulis sadar ini bukan hal yang mudah. Terimakasih telah benjadi penyemangat penulis ketika harus bekerja dan berkuliah.
8. Kepada sahabatku sejak Sekolah Menengah Atas, Irma Khairani dan Dessy Mayang Sari terimakasih telah menjadi sahabat penulis terimakasih sudah menyemangati penulis, tidak pernah meninggalkan penulis dalam keadaan apapun, dan terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah penulis. Kepada sahabat sahabatku yang ada di bangku perkuliahan, Aqila Adwa Ulaya, Malem Syafitri Samura, Bulan Suci Hasibuan, Erika Br Aruan,

Jeklin Monalisa Sianturi dan Putri Dera Ananda, penulis mengucapkan banyak terimakasih karena sudah mau mendengarkan curhatan kecil dan terimakasih sudah menemani masa masa sulit penulis, I will always love you guys.

9. Terakhir terimakasih kepada orang-orang yang pernah singgah di hidup penulis. Penulis mengucapkan terimakasih karena pernah hadir dan memberikan dukungan, arahan dan semangat serta pembelajaran berharga dalam perjalanan hidup penulis, yang secara tidak langsung turut membentuk watak, kedewasaan dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, bagi semua pihak yang membacanya.

Medan, 2026

Penulis

Chaliza

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1 Rumusan Masalah	8
1.2 Tujuan Penelitian.....	9
1.3 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Komunikasi Pemerintahan	11
2.3.1 Definisi Komunikasi Pemerintahan.....	11
2.1.2 Komunikasi Pemerintahan Ditingkat Desa	12
2.2 Fungsi Komunikasi Dalam Pemerintahan Desa.....	16
2.3 Kosnep Lingkungan Kumuh Dan Penanganannya.....	18
2.3.1 Definisi Lingkungan Kumuh	18
2.3.2 Aspek dan Karakteristik Lingkungan Kumuh	20
2.3.3 Faktor Penyebab Lingkungan Kumuh	24
2.3.4 Dampak Dari Lingkungan Kumuh.....	25
2.3.5 Strategi Penanganan Lingkungan Kumuh	27
2.3.6 Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Lingkungan Kumuh	29
2.3.6.1 Partisipasi dalam Perencanaan	30
2.3.6.2 Partisipasi dalam Pelaksanaan	31

2.3.6.3 Partisipasi dalam Pengawasan	32
2.3.6.4 Partisipasi dalam Pemeliharaan	33
2.3.6.5 Partisipasi dalam Perubahan Perilaku	34
2.5 Penelitian Terdahulu	35
2.6 Kerangka Berpikir	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Sifat Penelitian	42
3.3 Informan Penelitian	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data	45
3.5 Teknik Analisis Data	47
3.6 Jenis dan Sumber Data	48
3.7 Lokasi Dan Jadwal Penelitian	49
Table 3.2 Jadwal Penelitian	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Hasil Penelitian	51
4.1.1 Gambaran Umum Desa Pagar Merbau I	51
4.1.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	55
4.1.3 Kondisi Lingkungan dan Pemukiman Kumuh	57
4.2 Pembahasan	59
4.2.1 Fungsi Komunikasi Pemerintahan Pagar Merbau I Dalam Penanganan Lingkungan Kumuh	59
1. Fungsi Informatif	60
2. Fungsi persuasif	64
3. Fungsi Edukatif	69
4. Fungsi Rekreatif	72
4.2.2 Kendala Yang Dihadapi Lingkungan Kumuh Di Desa Pagar Merbau I Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	85
5.1 Kesimpulan	85

5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
Lampiran I Surat Permohonan.....	93
Lampiran II Surat Selesai.....	94
Lampiran III Lokasi Penelitian.....	95
Lampiran IV Dokumentasi	96
Lampiran V Wawancara Peneliti	98





DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 2. 2 Kerangka Berpikir	Error! Bookmark not defined.
Table 3.1 Informan Penelitian	44





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antar manusia (*human communication*) yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Karena itu komunikasi pemerintahan tidak lepas dari konteks komunikasi organisasi dan komunikasi pemerintahan juga merupakan bagian dari komunikasi organisasi. Arus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifat hubungannya saling tergantung satu sama lain berdasarkan aturan-aturan formal. Pesan yang disampaikan dan yang diterima bukan saja berupa informasi, melainkan juga penyebaran ide-ide (*sharing ideas*), instruksi (*instruction*), atau perasaan-perasaan (*feelings*) (Malone, 1997: 170) yang tentunya sudah pasti berhubungan tentang tindakan dan kebijakan pemerintah. Birokrat pemerintah bisa berbagi informasi, gagasan atau perasaan melalui komunikasi.

Komunikasi sudah pasti tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan manusia dimana manusia sendiri merupakan makhluk sosial. Dengan kata lain komunikasi bisa diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator (*pihak yang mengirimkan pesan*) kepada komunikan (*penerima pesan dalam proses komunikasi*) dengan menggunakan media tertentu. Suatu komunikasi akan berjalan dengan baik apabila komunikator dan komunikan mencapai pengertian atau pemahaman dan pemaknaan yang sama tentang suatu hal yang menjadi bahan komunikasi tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, berbagai hal di kehidupan manusia membutuhkan komunikasi, salah satunya adalah dalam konteks interaksi pemerintah dan

masyarakat. Disinilah muncul konsep komunikasi pemerintahan, yang bisa diartikan sebagai penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara (Hasan, 2005).

Bagaimanapun organisasi pemerintahan tidak akan dapat melaksanakan fungsinya, dan tidak akan dapat mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan sumber-sumbernya, dan pada akhirnya tidak akan dapat mencapai tujuannya tanpa komunikasi (Beach, 1975: 580). Pemahaman terhadap peristiwa komunikasi yang ada dalam suatu organisasi pemerintah, dan seperti apa pesan yang sudah diterima dan dilaksanakan dengan benar, memungkinkan pemerintah sudah mencapai tujuannya sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu komunikasi pemerintahan salah satu fungsi penting dalam organisasi pemerintahan baik untuk *managing staff* dan *managing people*.

Maka terdapat 2 Fungsi dari komunikasi pemerintah: *pertama, to manage staff*. Fungsi ini merupakan fungsi komunikasi internal dalam suatu organisasi pemerintahan baik dalam bentuk *downward communication* maupun *upward communication*. Fungsi ini merujuk pada konsep komunikasi organisasional, yang didefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam konteks hubungan atau interaksi dalam sebuah organisasi. *Kedua, to manage people*. Fungsi ini merupakan fungsi komunikasi pemerintahan yang mengarah pada komunikasi eksternal atau kepada publik dan stakeholder diluar organisasi pemerintahan.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil fungsi atau peran komunikasi pemerintahan terhadap masyarakat atau stakeholder diluar organisasi pemerintahan atau yang disebut sebagai komunikasi pemerintahan eksternal organisasi. Komunikasi eksternal dimaksud untuk mengirim informasi publik (*public*

information) oleh administrator/aparatur pemerintah kepada masyarakat atau stakeholder diluar dari organisasi dan mengakomodasi opini public (*public opinion*). Demi mencapai pembangunan yang lebih maju maka diperlukan komunikasi antara pemerintah dan Masyarakat.

Pembangunan nasional yang berkelanjutan menekankan pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa, tidak hanya dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, tetapi juga dalam aspek lingkungan hidup. Lingkungan yang sehat dan tertata merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penataan dan pengelolaan lingkungan, khususnya di kawasan yang rentan terhadap kekumuhan, menjadi prioritas dalam agenda pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah (Bappenas, 2020). Salah satu landasan yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan peran kelembagaan dalam Pembangunan permukiman dan lingkungan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa perumahan berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar dari kawasan hutan lindung.

Di Indonesia, penanganan kawasan kumuh telah menjadi fokus berbagai program pemerintah, seperti Program Kota Tanpa Kumuh (*KOTAKU*), yang bertujuan meningkatkan kualitas permukiman melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Meskipun program-program tersebut lebih banyak menasar kawasan perkotaan, kenyataannya kekumuhan tidak hanya terjadi di kota, melainkan juga

mulai tampak di berbagai desa. Lingkungan kumuh di desa muncul sebagai akibat dari perkembangan penduduk yang tidak diimbangi dengan perencanaan ruang yang baik, minimnya infrastruktur dasar, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan sanitasi lingkungan (Kementerian PUPR, 2019).

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentunya harus bekerja sama dalam upaya membangun komunikasi untuk mengatasi lingkungan kumuh sebagai prioritas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dan kapasitas pemerintah daerah saat ini yang masih kurang optimal dalam penanganan lingkungan kumuh yang ada di Indonesia, sehingga peran pemerintah pusat tentunya masih sangat dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi. Organisasi atau pemerintah dalam menyampaikan pesan pembangunan tentu harus memiliki kredibilitas, kesamaan, daya tarik dalam hal kebutuhan, perasaan dan harapan sehingga masyarakat dapat dipengaruhi untuk mengikuti keinginan pemerintah sehingga pembangunan dapat dilaksanakan.

Maka dari itu pemerintah pusat melalui pemerintah daerah memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu dapat meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar di daerah kumuh untuk mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan, kemudian diterjemahkan ke dalam skala mikro untuk menciptakan lingkungan dan pemukiman yang layak huni di tingkat desa khususnya Desa Pagar Merbau I. Untuk mencapai tujuan tersebut, serangkaian kegiatan di tingkat kabupaten / kota dan tingkat desa / kelurahan disinergikan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat hingga ke tingkat desa dalam menanggulangi kawasan kumuh. Namun, efektivitas program tersebut

sangat bergantung pada bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dijalankan. Dalam konteks ini, komunikasi pemerintahan desa memegang peranan penting sebagai jembatan antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan lingkungan kumuh tidak terlepas dari kualitas komunikasi antara aparat pemerintah dan warga. Yuliani (2018) dalam penelitiannya di Kota Surabaya menekankan pentingnya pendekatan partisipatif melalui program Kampung Improvement Program (KIP), yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Astuti (2019) juga menyoroti peran penting komunikasi antarlembaga dalam penataan lingkungan kumuh di Kelurahan Marunda, Jakarta Utara, dan menyatakan bahwa koordinasi yang baik menjadi kunci keberhasilan program.

Desa Pagar Merbau I umumnya sudah memiliki beberapa kegiatan rutin seperti gotong royong bulanan namun hal itu juga belum dapat mencegah atau menangani kondisi kebersihan di lingkungan tersebut, hal ini di dasari oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan demi melanjutkan hidup yang lebih baik lagi. Maka dari itu penelitian ini didasari oleh ketidaktahuan peneliti tentang bagaimana komunikasih pemerintah Desa dengan masyarakat, apakah komunikais yang telah dijalankan sudah berjalan baik atau ada mines dalam komunikasi selain itu Desa Pagar Merbau I, yang terletak di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, merupakan salah satu desa yang menghadapi persoalan lingkungan kumuh. Beberapa indikator yang menunjukkan kekumuhan di desa ini antara lain buruknya sistem drainase, banyaknya sampah yang menumpuk di lingkungan permukiman, tidak adanya tempat pembuangan sampah yang memadai, serta permukiman padat dengan akses

jalan lingkungan yang sempit dan rusak. Selain itu, perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan serta kurangnya inisiatif kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan turut memperparah keadaan.

Dalam konteks ini, pemerintahan desa sebagai ujung tombak pelayanan publik dan penggerak pembangunan di tingkat akar rumput memiliki peran sentral dalam menanggulangi masalah lingkungan. Salah satu instrumen penting yang dimiliki pemerintah desa dalam menjalankan peran tersebut adalah komunikasi. Fungsi komunikasi dalam pemerintahan desa tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi, tetapi juga dalam membangun kesadaran, menyosialisasikan program, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, termasuk dalam penanganan lingkungan kumuh (Effendy, 2003).

Komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat dapat menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan publik dengan kebijakan pemerintah. Melalui komunikasi, pemerintah desa dapat menjelaskan urgensi masalah lingkungan, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam program bersih desa, serta membangun komitmen kolektif terhadap perubahan perilaku dan peningkatan kualitas lingkungan. Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman, resistensi, dan minimnya keterlibatan warga dalam program penataan lingkungan (Cangara, 2014).

Dalam praktiknya, pelaksanaan komunikasi pemerintahan desa tidak selalu berjalan dengan baik. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya literasi komunikasi aparatur desa, serta kurangnya saluran atau media komunikasi yang efektif

(Mulyana, 2005). Selain itu, karakteristik masyarakat pedesaan yang cenderung heterogen dalam tingkat pendidikan, ekonomi, dan budaya juga menjadi tantangan tersendiri dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan.

Penelitian tentang fungsi komunikasi pemerintahan desa dalam penanganan lingkungan kumuh menjadi penting untuk dilakukan, khususnya di Desa Pagar Merbau I yang hingga kini masih bergelut dengan permasalahan lingkungan. Melalui penelitian ini, penulis ingin menggali lebih dalam bagaimana pemerintah desa menjalankan fungsi komunikasinya dalam upaya menyelesaikan masalah kekumuhan, strategi komunikasi apa saja yang digunakan, serta sejauh mana komunikasi tersebut mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan perubahan sosial yang diharapkan.

Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang komunikasi pemerintahan dan pembangunan masyarakat desa, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan kontekstual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan tentang pentingnya komunikasi dalam proses pembangunan desa yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan (Rogers, 2003).

Secara umum, latar belakang penelitian ini berangkat dari kesadaran akan pentingnya peran komunikasi dalam mendukung kebijakan dan program pemerintah desa, khususnya dalam menangani persoalan lingkungan kumuh yang kompleks. Komunikasi bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga instrumen untuk membangun kepercayaan, membentuk opini publik, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kajian

mengenai fungsi komunikasi pemerintahan desa dalam konteks penanganan lingkungan kumuh menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang responsif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pagar Merbau I. Desa Pagar Merbau I merupakan desa yang terletak di Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang. Desa Pagar Merbau I terdiri dari 4 dusun, secara umum desa Pagar Merbau I merupakan desa dengan penduduk relative rendah dibandingkan dengan desa-desa yang lain dalam lingkup Kecamatan Pagar Merbau, dengan jumlah penduduk menurut BPS tahun 2024 sekitar 1.543 jiwa dengan total luas wilayah 1.00 KM²/sq.km dengan terdiri dari 4 Dusun. Penelitian ini dilakukan di salah satu dusun yang berada di Desa Pagar Merbau I, dari data Pemerintah Desa Pagar Merbau I diketahui bahwa Dusun I memiliki penduduk 491 jiwa dengan total 121 KK dan luas wilayah hanya 2 hektar. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat kepadatan yang cukup tinggi. Ditambah dengan keterbatasan sarana prasarana dan tata lingkungan yang kurang memadai, Dusun I digolongkan sebagai kawasan kumuh yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah desa.”

Hal ini membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian ini karena saya ingin melihat bagaimana komunikasi pemerintah Desa kepada masyarakat Dusun I Desa Pagar Merbau I. kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti gotong royong sudah dilakukan tetapi hanya merubah beberapa dimensi saja. Belum bisa merubah situasi ataupun kondisi kekumuhan yang ada di lingkungan tersebut.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang

diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi komunikasi Pemerintahan Desa Pagar Merbau I dalam penanganan lingkungan kumuh di wilayahnya?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan komunikasi pemerintahan desa terkait Penanganan Lingkungan Kumuh di Desa Pagar Merbau I Kecamatan Pagar merbau, Kab Deli Serdang?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fungsi komunikasi pemerintahan yang ada di Pemerintahan Desa Pagar Merbau I dalam penanganan lingkungan kumuh di wilayahnya.
2. Untuk mengetahui factor penghambat pemerintahan Desa Pagar Merbau I dalam pelaksanaan komunikasi pemerintahan terkait program penataan lingkungan di kawasan kumuh.

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang komunikasi pemerintahan dan komunikasi pembangunan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tentang peran komunikasi dalam penanganan masalah lingkungan, terutama di tingkat pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah Desa Pagar Merbau I dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan partisipatif dalam penanganan lingkungan kumuh

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya komunikasi yang baik dengan pemerintah desa serta mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan permukiman.

c. Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya membangun sistem komunikasi yang terbuka dan responsif antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi Pemerintahan

2.3.1 Definisi Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi pemerintahan adalah proses penyampaian informasi, kebijakan, atau program pemerintah kepada masyarakat, baik secara vertikal, horizontal, maupun diagonal, dengan tujuan membangun pemahaman, menciptakan partisipasi, dan mendukung kelancaran pelaksanaan program publik (Cangara, 2014). Dalam konteks pemerintahan desa, komunikasi menjadi sarana untuk menjembatani interaksi antara pemerintah desa dengan masyarakat agar tercipta kesepahaman dan kerja sama yang produktif.

Pesan yang disampaikan dan yang diterima bukan saja berupa informasi, melainkan juga penyebaran ide-ide (sharing ideas), instruksi (instruction), atau perasaan-perasaan (feelings) (Malone, 1997: 170) berhubungan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah. Melalui komunikasi pemerintahan, birokrat pemerintah berbagi informasi, gagasan atau perasaan, dan sikap dengan partisipan komunikasi lainnya yang disebut komunikan, yaitu aparatur pemerintah untuk internal organisasi dan dunia usaha, masyarakat dan organisasi- organisasi non-pemerintah untuk eksternal organisasi, dan sebaliknya.

Menurut Liliweri (2003), komunikasi pemerintahan merupakan bagian dari komunikasi organisasi yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi publik secara efektif dan efisien, guna mencapai tujuan negara dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, Rogers dan Agarwala-Rogers (1976),

komunikasi pemerintahan merupakan proses penyampaian pesan yang bersifat administratif dari lembaga-lembaga pemerintahan kepada masyarakat guna mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku publik. Sementara Menurut Liliweri (2003).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemerintahan adalah Proses penyampaian informasi, kebijakan, dan program dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya, yang dilakukan secara strategis dan terencana, dengan tujuan membangun pemahaman, partisipasi, dan dukungan publik terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Komunikasi ini mencakup interaksi vertikal (antar instansi pemerintah) maupun horizontal (antara pemerintah dan masyarakat), serta mengandalkan berbagai media dan saluran komunikasi.

2.1.2 Komunikasi Pemerintahan Ditingkat Desa

Pemerintahan desa memegang peranan penting dalam implementasi berbagai kebijakan dan program pemerintah, terutama yang bersifat langsung menyentuh masyarakat. Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan, termasuk dalam penanganan lingkungan kumuh. Di tingkat desa, komunikasi dilakukan melalui berbagai cara seperti Musyawarah Desa (Musdes), pertemuan warga, pengumuman melalui masjid, serta pendekatan informal. Komunikasi ini sering kali lebih bersifat personal dan berbasis budaya lokal. Pemimpin desa seperti kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan sikap warga.

Menurut Sutisna (2019), efektivitas komunikasi pemerintahan di desa dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kualitas pesan, karakter komunikator, dan

partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi aparat desa untuk memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang baik dan memahami karakteristik sosial-budaya masyarakatnya.

Proses komunikasi pemerintahan desa kepada masyarakat di Desa Pagar Merbau I Kec. Pagar Merbau Kab Deli Serdang, dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk komunikasi tatap muka, rapat-rapat, media sosial, dan media massa lokal. Pemerintah desa juga dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan media tradisional untuk meningkatkan efektivitas komunikasi.

Cara-cara Komunikasi di pemerintahan desa:

1. Komunikasi Tatap Muka:

Komunikasi tatap muka adalah proses penyampaian pesan secara langsung antara komunikator dan komunikan tanpa perantara media, di mana kedua belah pihak bisa saling melihat ekspresi wajah, gerak tubuh, dan mendengar intonasi suara.

Dalam konteks pemerintahan desa, komunikasi tatap muka memiliki beberapa fungsi strategis, antara lain:

- a. Sosialisasi Kebijakan dan Program Desa, melalui rapat desa, musyawarah dusun, atau pertemuan informal, aparat desa dapat menyampaikan langsung informasi tentang kebijakan, rencana pembangunan, atau bantuan sosial kepada warga.
- b. Menampung Aspirasi dan Keluhan Warga, pertemuan tatap muka memungkinkan warga menyampaikan secara langsung aspirasi, kebutuhan, atau keluhan mereka. Ini sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang partisipatif dan responsif.

- c. Pembangunan Hubungan Sosial dan Emosional, interaksi langsung membantu membangun kepercayaan dan kedekatan emosional antara aparat desa dan masyarakat, yang menjadi modal penting dalam pelaksanaan program- program pembangunan.
- d. Mediasi dan Penyelesaian Konflik, dalam masyarakat desa, konflik sosial atau perbedaan kepentingan sering kali diselesaikan melalui musyawarah tatap muka, di mana semua pihak dapat berdialog untuk mencapai mufakat.

2. Media Sosial:

Komunikasi pemerintahan melalui media sosial adalah proses penyampaian informasi, kebijakan, dan interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat desa menggunakan platform media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, cepat, dan efisien. Media sosial berperan sebagai:

- a. Saluran Informasi: Menyampaikan pengumuman desa, agenda kegiatan, peringatan dini (early warning), dan hasil musyawarah desa.
- b. Media Aspirasi: Menampung keluhan, saran, dan masukan dari masyarakat secara langsung.
- c. Alat Transparansi: Menampilkan laporan anggaran, dokumentasi kegiatan, dan progres pembangunan.
- d. Alat Partisipasi: Mengajak warga ikut serta dalam kegiatan gotong royong, forum diskusi, hingga polling kebijakan desa.

3. Media Massa Lokal:

Media massa lokal adalah sarana komunikasi publik yang beroperasi di

tingkat daerah atau lokal dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat. Media massa lokal memainkan peran penting dalam:

- a. Penyebaran informasi desa: Seperti agenda musyawarah desa, pengumuman bantuan sosial, dan program pembangunan.
- b. Mengawasi dan mengontrol kebijakan: Media lokal bisa menjadi jembatan transparansi antara pemerintah desa dan masyarakat.
- c. Menumbuhkan kesadaran publik: Edukasi masyarakat tentang kebersihan lingkungan, kesehatan, atau program desa.
- d. Memperkuat identitas lokal: Media lokal sering menampilkan kearifan lokal, budaya, dan kegiatan sosial desa.

4. Media Tradisional:

Media tradisional adalah sarana komunikasi yang berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat dan biasanya berbasis budaya lokal, bersifat lisan, visual, dan partisipatif. Media ini digunakan untuk menyampaikan pesan sosial, budaya, dan pemerintahan secara informal maupun formal. Media tradisional berfungsi sebagai:

- a. Sarana penyebaran informasi: Seperti pemberitahuan kerja bakti, bantuan sosial, atau kebijakan baru desa.
- b. Alat pemanggil warga: Kentongan atau pengeras suara dipakai untuk memanggil warga saat musyawarah atau situasi darurat.
- c. Media edukasi dan sosialisasi: Dalam bentuk pagelaran budaya yang mengandung pesan tentang kebersihan, gotong royong, atau larangan buang sampah sembarangan.

2.2 Fungsi Komunikasi Dalam Pemerintahan Desa

Effendy (2003) mengemukakan bahwa terdapat empat fungsi utama komunikasi, yaitu: (1) fungsi informatif, (2) fungsi edukatif, (3) fungsi persuasif, dan (4) fungsi rekreatif. Dalam konteks pemerintahan desa, keempat fungsi ini dapat diadaptasi sebagai berikut:

1. Fungsi Informatif

Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan informasi. Dalam pemerintahan desa, hal ini berarti pemerintah desa bertanggung jawab memberikan informasi kepada masyarakat desa tentang kebijakan, program, hak dan kewajiban warga, serta kegiatan pembangunan. Informasi yang disampaikan secara jelas dan terbuka akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

2. Fungsi Edukatif

Komunikasi juga berperan sebagai alat pendidikan. Artinya, melalui komunikasi, masyarakat dapat dibimbing, diberi pemahaman, dan diarahkan agar memiliki pengetahuan atau keterampilan tertentu. Contohnya, penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan oleh aparat desa.

3. Fungsi Persuasif

Fungsi ini bertujuan mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain agar sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah desa, misalnya, menggunakan komunikasi persuasif untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan.

4. Fungsi Rekreatif

Fungsi ini berkaitan dengan hiburan dan kesenangan. Komunikasi yang

bersifat ringan dan menghibur dapat menciptakan suasana positif, mempererat hubungan sosial, serta mengurangi ketegangan. Dalam konteks pemerintahan desa, ini bisa berupa kegiatan seni budaya yang juga menyampaikan pesan-pesan lingkungan secara tidak langsung.

Teori Fungsi Komunikasi – Harold D. Lasswell (1948), Lasswell mengemukakan bahwa komunikasi memiliki tiga fungsi utama dalam kehidupan sosial, yang juga dapat diaplikasikan dalam konteks pemerintahan desa:

1. Pengawasan lingkungan (*Surveillance of the environment*)

Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan komunikasi untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang lingkungan masyarakat. Dalam konteks desa, pemerintah desa berfungsi sebagai pengawas atas berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, sanitasi, pendidikan, dan sebagainya.

2. Korelasi bagian-bagian masyarakat (*Correlation of the parts of society*)

Pemerintah desa menjadi penghubung antara berbagai kelompok dalam masyarakat desa seperti kelompok tani, pemuda, perempuan, dan tokoh adat.

3. Transmisi warisan sosial (*Transmission of social heritage*)

Pemerintah desa juga memiliki peran untuk menyampaikan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan tradisi kepada generasi muda. Ini dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti pertemuan desa, kegiatan adat, atau melalui media lokal.

Atz dan Kahn (1966) melihat organisasi sebagai sistem terbuka yang membutuhkan komunikasi untuk menjaga stabilitas dan fungsi. Dalam konteks desa, pemerintahan desa adalah organisasi publik yang melibatkan struktur dan sistem komunikasi formal maupun informal.

a. Komunikasi Vertikal

Dalam pemerintahan desa, komunikasi vertikal terjadi dari atasan ke bawahan (misalnya dari kepala desa ke kepala dusun), dan sebaliknya. Informasi dari masyarakat dapat naik ke atas untuk dijadikan pertimbangan kebijakan, sementara arahan atau program kerja dari pimpinan disampaikan ke pelaksana teknis.

b. Komunikasi Horizontal

Komunikasi Horizontal ini adalah komunikasi yang terjadi di antara perangkat desa yang setara, seperti antara sekretaris desa dan kepala dusun. Komunikasi ini penting untuk koordinasi dan kolaborasi antarbidang pemerintahan desa. Komunikasi organisasi yang baik akan meningkatkan efisiensi kerja, mencegah konflik internal, dan mendukung pelayanan publik yang lebih efektif.

McCombs dan Shaw (1972) menyatakan bahwa media atau pihak yang mengendalikan informasi dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap pentingnya suatu isu. Misalnya, dengan menjadikan isu kebersihan lingkungan sebagai agenda utama, maka desa dapat mengarahkan perhatian dan keterlibatan warga untuk fokus pada pengelolaan sampah dan kebersihan kampung. Media komunikasi seperti baliho, pengumuman masjid, dan grup WhatsApp desa berperan dalam membentuk opini publik.

2.3 Kosnep Lingkungan Kumuh Dan Penanganannya

2.3.1 Definisi Lingkungan Kumuh

Sesuai dengan pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang

tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Kawasan kumuh menurut Kementerian PUPR (2019) adalah permukiman yang tidak layak huni karena kondisi bangunan rumah yang tidak sesuai standar, ketidakteraturan bangunan, ketidakcukupan sarana prasarana dasar (air bersih, sanitasi, drainase), serta tingginya kepadatan penduduk dan risiko sosial. Permasalahan kekumuhan di desa dapat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, kebiasaan membuang sampah sembarangan, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sanitasi dan kebersihan.

Sementara itu, UN-HABITAT (2003) mendefinisikan kawasan kumuh (*slum*) sebagai daerah perkotaan yang ditandai oleh kepadatan tinggi, kualitas perumahan yang rendah, keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi, dan minimnya kepemilikan rumah secara legal. Meskipun konsep ini banyak dikaitkan dengan kawasan perkotaan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kekumuhan juga dapat dijumpai di daerah pedesaan, khususnya pada desa-desa yang mengalami urbanisasi tanpa perencanaan tata ruang yang memadai.

Menurut Kuswantojo (2002:45), lingkungan kumuh adalah suatu kawasan permukiman yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan lingkungan, ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, kepadatan tinggi, dan minimnya prasarana dasar seperti air bersih, sanitasi, serta drainase. Kondisi ini menyebabkan lingkungan tersebut rentan terhadap masalah kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Maryunani (2012:76) mengemukakan bahwa lingkungan kumuh adalah wilayah permukiman yang memiliki kondisi fisik dan sosial yang tidak memadai, seperti bangunan rumah yang tidak layak huni, sistem sanitasi yang buruk, serta

kurangnya pengelolaan sampah. Lingkungan seperti ini juga seringkali menunjukkan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang rendah.

2.3.2 Aspek dan Karakteristik Lingkungan Kumuh

Kekumuhan dapat dikenali melalui sejumlah karakteristik yang bersifat multidimensional. Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya (2016), terdapat tujuh indikator utama kawasan kumuh yang digunakan dalam program penanganan KOTAKU, yaitu:

- a. Bangunan Tidak Layak Huni, Bangunan tidak layak huni adalah bangunan tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat minimum keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan bagi penghuninya. Bangunan ini bisa mengalami berbagai masalah, seperti kerusakan fisik, sanitasi yang buruk, ventilasi tidak memadai, hingga fasilitas air bersih yang tidak tersedia.
- b. Tingkat Kepadatan Penduduk Tinggi Banyaknya jumlah penghuni dalam satuan luas tertentu menyebabkan tekanan tinggi terhadap lahan dan fasilitas umum.
- c. Kondisi Infrastruktur Buruk Jalan sempit, tidak beraspal, tidak ada drainase atau saluran air yang memadai, serta buruknya sistem pengelolaan sampah.

Akses Terbatas terhadap Pelayanan Dasar, Akses terhadap pelayanan dasar mengacu pada kemampuan masyarakat untuk memperoleh layanan- layanan penting yang mendukung kebutuhan hidup sehari-hari, seperti: Air bersih, sanitasi yang layak, layanan Kesehatan, pendidikan dasar, Listrik, transportasi. ketika akses ini terbatas, berarti masyarakat mengalami kesulitan atau hambatan untuk

mendapatkan layanan tersebut secara memadai, yang berdampak negatif pada kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

- a. Letak Geografis Tidak Strategis, Letak geografis tidak strategis merujuk pada posisi suatu wilayah atau desa yang kurang menguntungkan dari segi aksesibilitas, konektivitas, dan potensi pengembangan. Desa atau permukiman yang memiliki letak geografis seperti ini biasanya sulit dijangkau oleh transportasi umum, jauh dari pusat-pusat ekonomi atau pelayanan publik, serta berada di lokasi yang rawan bencana alam atau kondisi lingkungan yang kurang mendukung.
- b. Tingkat Kemiskinan Tinggi, Tingkat kemiskinan tinggi menunjukkan persentase penduduk dalam suatu wilayah yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu kondisi dimana penduduk tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan secara layak. Kemiskinan adalah fenomena multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan pendapatan rendah, tetapi juga keterbatasan akses terhadap sumber daya dan layanan sosial.

Dalam konteks desa seperti Pagar Merbau I, indikator tersebut umumnya muncul dalam bentuk seperti jalan tanah yang becek saat hujan, rumah berdempetan tanpa ventilasi yang cukup, tidak adanya tempat pembuangan sampah, serta perilaku warga yang masih membuang limbah rumah tangga ke parit atau sungai. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kekumuhan bukan hanya terkait dengan aspek fisik, tetapi juga aspek perilaku dan sosial.

Terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar bahwa suatu lingkungan dikatakan kumuh adalah sebagai berikut:

1. Aspek Pengelolaan Air Limbah/Sanitasi

Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis: Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu, kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis: Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: a. Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; b. tidak tersedianya pengelolaan limbah setempat atau terpusat.

2. Aspek Pengelolaan Persampahan

Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis: Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: (a). tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik tau rumah tangga; (b). tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; (c). sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.

Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis: Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut; (a). pewadahan dan pemilahan domestik; (b). pengumpulan lingkungan; (c). pengangkutan lingkungan; (d). pengelolaan lingkungan.

3. Aspek Proteksi Kebakaran

Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia: Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; dan/atau; 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan.

Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia: Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau mobil tangga sesuai kebutuhan. Jika terdapat pemadam kebakaran dengan radius 5 km dari kawasan permukiman kumuh maka dinyatakan sudah terpenuhi dari Aspek Proteksi Kebakaran dan tidak ada penanganan terkait aspek tersebut.

Salah satu permasalahan perumahan di Indonesia adalah semakin meluasnya permukiman kumuh. Dalam jangka waktu tiga tahun ternyata luas permukiman kumuh di Indonesia bertambah hingga 18%. Pada tahun 1996, luas permukiman kumuh di Indonesia mencapai 40.053 hektar. Sedangkan pada tahun 2000, luas permukiman kumuh telah berkembang menjadi 47.393 hektar. Namun demikian, data terakhir tahun 2003 menunjukkan bahwa luas permukiman kumuh berhasil diturunkan menjadi 45.565 hektar.

Laju pertumbuhan kawasan kumuh (di pusat kota maupun di tepi kota) juga dipicu oleh keterbatasan kemampuan dan ketidakpedulian masyarakat untuk melakukan perbaikan rumah (*home improvement*). Hal lain yang juga menjadi pemicu adalah ketidakharmonisan antara struktur infra- struktur kota, khususnya jaringan jalan dengan kawasan permukiman yang terbangun. Di pinggir kota hal tersebut yang menimbulkan *urban sprawl* yang membawa dampak kepada kemacetan (*congestion*), ketidakaturan, yang pada akhirnya menimbulkan

ketidakefisienan serta pemborosan energi dan waktu.

2.3.3 Faktor Penyebab Lingkungan Kumuh

Permasalahan permukiman kumuh sudah menjadi polemik yang harus dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia. Laju penduduk yang sangat pesat merupakan penyebab utama terjadinya pertumbuhan permukiman, dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah, maka terjadi permukiman kumuh. Sebagian besar penghuni permukiman kumuh memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Dengan tingkat pendapatan penghuni permukiman kumuh yang rendah menjadi salah satu faktor penyebab munculnya permukiman kumuh di suatu wilayah. Rendahnya pendapatan akibat dari semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan membuat meningkatnya masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan menjadikan semakin sulitnya untuk menyediakan permukiman layak dihuni untuk mereka sendiri.

Terjadinya permukiman kumuh juga disebabkan oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Pendidikan menjadi salah satu faktor dalam mendapatkan suatu pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang dimiliki. Bagi mereka masyarakat miskin yang memiliki pendapatan yang rendah, mereka tidak mampu mengeluarkan biaya pemeliharaan lingkungan permukiman yang layak dihuni.

Tentunya ada beberapa factor yang menyebabkan suatu lingkungan menjadi kumuh. Beberapa factor penyebabnya adalah

1. Urbanisasi dan Migrasi, Pertumbuhan penduduk kota yang cepat tidak diimbangi dengan penyediaan rumah terjangkau. Banyak pendatang mendirikan permukiman informal (Firman, 2019; Sugiono, 2020).

2. Kemiskinan Struktural, Keterbatasan daya beli menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu tinggal di permukiman legal (Soesilo, 2018). Kemiskinan Struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh struktur atau sistem sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil, sehingga menciptakan hambatan sistemik bagi kelompok tertentu untuk keluar dari kemiskinan.

3. Kelemahan Regulasi dan Penataan Ruang, Kurangnya penegakan hukum menyebabkan banyak kawasan kumuh tumbuh di lahan tidak sah (Simarmata, 2017).

4. Kurangnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat, Rendahnya kesadaran lingkungan dan pola hidup tidak sehat mempercepat degradasi lingkungan (Yuliani, 2021).

Lemahnya Koordinasi Antarinstansi, Program perumahan sering berjalan sektoral tanpa koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (Marlina & Fitria, 2020). Lemahnya Koordinasi Antarinstansi merupakan salah satu faktor krusial yang sering menghambat efektivitas program penanganan lingkungan kumuh maupun kebijakan pembangunan secara umum, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam konteks pemerintahan desa seperti di Desa Pagar Merbau I, lemahnya koordinasi ini bisa berdampak langsung pada keterlambatan, tumpang tindih kebijakan, hingga kegagalan program yang menyasar masyarakat miskin atau lingkungan kumuh.

2.3.4 Dampak Dari Lingkungan Kumuh

Lingkungan kumuh adalah kawasan permukiman dengan kondisi lingkungan fisik dan sosial yang tidak memenuhi standar kelayakan huni.

Keberadaan lingkungan kumuh menimbulkan berbagai dampak multidimensional yang saling berkaitan dan memperparah kondisi masyarakat setempat.

1. Dampak terhadap Kesehatan Masyarakat

Lingkungan kumuh menciptakan kondisi hidup yang tidak sehat dan menjadi tempat berkembang biaknya berbagai penyakit. Hal ini terjadi karena:

a. Sanitasi yang Buruk

Sebagian besar kawasan kumuh tidak memiliki sistem pembuangan limbah rumah tangga yang layak. Limbah cair dibuang ke selokan terbuka atau langsung ke sungai, menyebabkan pencemaran air yang serius.

b. Air Bersih Tidak Tersedia atau Tercemar

Akses terhadap air bersih sangat terbatas. Banyak warga menggunakan air dari sumber yang tercemar untuk mandi, mencuci, bahkan memasak dan minum.

c. Kepadatan Penduduk yang Tinggi

Kepadatan tinggi mempercepat penularan penyakit menular karena kontak fisik yang lebih sering serta ventilasi yang buruk dalam rumah-rumah sempit.

d. Tempat Sampah Tidak Dikelola

Tumpukan sampah di sekitar rumah menjadi tempat berkembangnya nyamuk (*Aedes aegypti*) dan tikus, vektor penyakit seperti demam berdarah, leptospirosis, dan penyakit kulit.

2. Dampak terhadap Lingkungan Fisik

Permukiman kumuh menyebabkan degradasi lingkungan secara menyeluruh, diantaranya:

a. Pencemaran Tanah

Pembuangan limbah padat (sampah rumah tangga) langsung ke tanah

menyebabkan kontaminasi logam berat dan zat kimia berbahaya. Tanah menjadi tidak subur dan kehilangan daya dukung ekologis.

b. Pencemaran Air

Pencemaran sungai dan saluran air oleh limbah rumah tangga menyebabkan menurunnya kualitas air permukaan dan air tanah. Sungai-sungai menjadi hitam pekat dan berbau busuk.

c. Sistem Drainase yang Buruk

Minimnya saluran pembuangan menyebabkan genangan air di musim hujan, meningkatkan risiko banjir lokal. Air yang menggenang juga menimbulkan risiko penyakit dan kerusakan infrastruktur.

d. Degradasi Ekosistem

Lingkungan kumuh sering dibangun tanpa memperhatikan tata ruang. Hal ini menyebabkan rusaknya ekosistem lokal, seperti penebangan pohon, penimbunan rawa, dan pencemaran badan air.

Dampak lingkungan kumuh tidak bisa dipandang sebelah mata. Permasalahan yang ditimbulkan bersifat sistemik dan saling terkait antara aspek kesehatan, fisik, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan partisipatif dan multisektor, di mana pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta bekerja sama untuk mengubah kawasan kumuh menjadi lingkungan yang layak huni dan berkelanjutan.

2.3.5 Strategi Penanganan Lingkungan Kumuh

Penanganan kawasan kumuh tidak bisa dilakukan secara parsial atau bersifat proyek sesaat. Menurut pendekatan *Community-Based Development (CBD)* yang dikembangkan oleh Rogers (2003), penanganan kekumuhan yang efektif harus

berbasis pada pemberdayaan masyarakat, keterlibatan aktif warga, serta sinergi antara pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan pihak eksternal seperti LSM atau swasta.

Penanganan lingkungan kumuh merupakan tantangan multidimensi yang membutuhkan pendekatan terpadu dan berkelanjutan. Strategi yang dapat diterapkan tidak hanya terbatas pada perbaikan fisik lingkungan, tetapi juga harus menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat. Upaya perbaikan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, sistem sanitasi, drainase, serta pengelolaan sampah menjadi langkah awal yang penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan fisik. Di samping itu, penataan ulang permukiman yang semrawut perlu dilakukan dengan prinsip partisipatif, agar warga turut serta dalam proses penataan dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap perubahan yang terjadi. Renovasi rumah-rumah tidak layak huni, pembangunan MCK komunal, dan pembuatan taman atau ruang terbuka hijau menjadi bagian dari perbaikan tata ruang yang berorientasi pada keberlanjutan.

Aspek sosial tidak dapat dipisahkan dari strategi ini. Masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi komponen penting dalam penanganan kawasan kumuh. Pendidikan lingkungan, pelatihan keterampilan kerja, dan penyuluhan kesehatan perlu diberikan agar masyarakat mampu mandiri dan turut menjaga lingkungan sekitarnya. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kebersihan dan keteraturan lingkungan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

- Penyusunan perencanaan tata ruang desa (RT/RW) yang melibatkan warga.
- Sosialisasi dan edukasi lingkungan kepada masyarakat secara terus-menerus.
- Pengembangan infrastruktur dasar secara bertahap melalui Dana Desa atau bantuan pihak ketiga.
- Pembentukan kader lingkungan di tingkat dusun yang bertugas memantau dan melaporkan masalah lingkungan.
- Pemberlakuan Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan sampah, drainase, dan sanitasi.

Secara keseluruhan, penanganan lingkungan kumuh membutuhkan strategi yang holistik dan partisipatif. Tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan pemberdayaan ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang sehat, layak huni, dan berdaya tahan terhadap berbagai tantangan.

2.3.6 Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Lingkungan Kumuh

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen kunci dalam keberhasilan pembangunan, terutama dalam penanganan masalah lingkungan. Partisipasi berarti keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Cohen dan Uphoff (1977) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan terdiri atas empat bentuk, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan

hasil, dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Menurut Arnstein (1969) dalam teorinya *Ladder of Citizen Participation*, partisipasi warga dapat diklasifikasikan ke dalam delapan tingkatan, dari yang paling rendah seperti manipulasi dan terapi (bentuk partisipasi semu), hingga partisipasi tinggi seperti kemitraan (*partnership*), delegasi kekuasaan (*delegated power*), dan kendali masyarakat (*citizen control*). Teori ini menekankan bahwa partisipasi bukan sekadar hadir secara fisik, tetapi juga tentang sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Dalam konteks penanganan lingkungan kumuh di tingkat desa, partisipasi masyarakat dapat terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain:

2.3.6.1 Partisipasi dalam Perencanaan

Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam perencanaan dan penanganan lingkungan kumuh. Dalam konteks pembangunan berbasis masyarakat, partisipasi bukan hanya dilihat sebagai bentuk keterlibatan fisik masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Menurut Arnstein (1969), partisipasi memiliki beberapa tingkat, mulai dari partisipasi simbolik (*tokenism*) hingga partisipasi nyata (*citizen power*). Dalam penanganan lingkungan kumuh, idealnya masyarakat tidak hanya dijadikan objek pembangunan, tetapi menjadi subjek aktif yang memiliki suara dan pengaruh dalam menentukan arah perencanaan.

Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara aktif akan lebih responsif

terhadap kebutuhan lokal, memperkuat rasa memiliki terhadap program, serta meningkatkan keberlanjutan hasil pembangunan. Di tingkat desa, partisipasi dalam perencanaan dapat diwujudkan melalui forum-forum musyawarah desa, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), survei kebutuhan masyarakat, serta kegiatan pemetaan partisipatif (*participatory mapping*). Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat mengidentifikasi permasalahan lingkungan kumuh secara langsung dan bersama-sama merumuskan solusi yang kontekstual.

Kebijakan pemerintah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, termasuk dalam penanganan masalah lingkungan. Peran pemerintah desa dalam hal ini sangat vital sebagai fasilitator, mediator, sekaligus penggerak partisipasi masyarakat.

2.3.6.2 Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan merupakan kelanjutan dari keterlibatan mereka dalam proses perencanaan. Dalam konteks penanganan lingkungan kumuh, pelaksanaan mencakup berbagai kegiatan seperti pembersihan lingkungan, pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur dasar (jalan, drainase, sanitasi), penataan permukiman, serta pengelolaan limbah.

Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan proyek memberikan beberapa manfaat strategis. Pertama, partisipasi ini memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap hasil pembangunan, sehingga mendorong keberlanjutan (*sustainability*) *pasca-intervensi*. Kedua, keterlibatan masyarakat memungkinkan efisiensi biaya karena sebagian

pekerjaan dapat dilakukan secara swadaya atau gotong royong. Ketiga, partisipasi menciptakan proses belajar bersama yang memperkuat kapasitas masyarakat dalam menangani masalah lingkungan mereka sendiri. Menurut Cohen dan Uphoff (1980), partisipasi dalam pelaksanaan mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan teknis, penyediaan tenaga kerja atau bahan lokal, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Di desa-desa seperti Pagar Merbau I, bentuk partisipasi dalam pelaksanaan sering terwujud melalui kerja bakti, gotong royong, kontribusi tenaga atau material, serta pengawasan sosial oleh warga terhadap kualitas pekerjaan. Pemerintah desa berperan penting sebagai koordinator pelaksanaan, menjembatani antara perencanaan yang telah disepakati dan pelaksanaan teknis di lapangan.

2.3.6.3 Partisipasi dalam Pengawasan

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan merupakan aspek krusial dalam proses pembangunan berbasis partisipasi, terutama dalam upaya penanganan kawasan kumuh. Peran masyarakat dalam pengawasan tidak hanya sebatas mengontrol jalannya program, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, serta mutu dari setiap tahapan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pelaksana teknis (Soetomo, 2012).

Sebagaimana dijelaskan oleh Cohen dan Uphoff (1980), partisipasi masyarakat dalam pengawasan mencakup keterlibatan aktif dalam memantau proses pelaksanaan, mengevaluasi hasil yang dicapai, dan menilai dampak dari program yang dijalankan. Hal ini termasuk pengawasan terhadap penggunaan

anggaran, kualitas infrastruktur yang dibangun, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana awal yang telah disepakati bersama. Dalam pelaksanaan penanganan lingkungan kumuh, bentuk pengawasan masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti forum pengaduan warga, pembentukan kelompok pemantau berbasis komunitas, laporan berkala dari masyarakat, dan keterlibatan dalam evaluasi melalui musyawarah desa. Kehadiran masyarakat dalam fungsi pengawasan ini berperan dalam mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan dana, maupun pelaksanaan proyek yang menyimpang dari standar teknis (Kementerian PUPR, 2016).

Partisipasi dalam pengawasan juga meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama atas program yang dijalankan. Selain itu, hal ini memberi peluang bagi masyarakat untuk memahami dan menjalankan hak serta kewajiban mereka dalam sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Chambers, 1997).

2.3.6.4 Partisipasi dalam Pemeliharaan

Keterlibatan masyarakat dalam tahap pemeliharaan merupakan kelanjutan penting dari proses pembangunan berbasis partisipasi. Pemeliharaan mencakup berbagai tindakan untuk memastikan agar sarana dan prasarana seperti saluran drainase, jalan lingkungan, tempat penampungan sampah, serta fasilitas sanitasi tetap berfungsi secara optimal. Tanpa kontribusi aktif dari warga, fasilitas tersebut rentan mengalami kerusakan atau bahkan terbengkalai. Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan berperan penting dalam memperpanjang masa pakai infrastruktur serta mengurangi biaya perbaikan yang mungkin timbul di masa mendatang (Soetomo, 2012).

Menurut Cohen dan Uphoff (1980), bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap pemeliharaan dapat berupa kegiatan rutin seperti pembersihan, perbaikan ringan, maupun pelaporan apabila terjadi kerusakan yang lebih serius kepada pihak berwenang. Partisipasi aktif dalam merawat hasil pembangunan mencerminkan keberhasilan proses pemberdayaan. Masyarakat yang merasa memiliki terhadap hasil pembangunan akan lebih terdorong untuk menjaga dan memeliharanya secara sukarela. Rasa memiliki ini terbentuk melalui keterlibatan masyarakat sejak awal, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Dalam konteks desa seperti Pagar Merbau I, pemeliharaan lingkungan sering dilakukan secara kolektif melalui kegiatan gotong royong. Pemerintah desa dapat berperan dengan menyediakan alat atau bahan pendukung, memberikan pelatihan teknis sederhana, serta menyusun peraturan desa yang mendorong partisipasi masyarakat secara berkesinambungan. Agar pemeliharaan berjalan efektif, perlu adanya kerja sama yang baik antara masyarakat, aparat desa, dan lembaga terkait lainnya.

2.3.6.5 Partisipasi dalam Perubahan Perilaku

Keterlibatan warga dalam mengubah perilaku mereka menunjukkan keberhasilan pemberdayaan sosial. Ketika masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari, maka hasil pembangunan akan bertahan lebih lama dan memberikan manfaat bagi kesehatan, kenyamanan, serta kelestarian lingkungan.

Menurut Soetomo (2012), partisipasi dalam perubahan perilaku dapat terwujud melalui proses peningkatan kesadaran bersama, edukasi lingkungan, serta pembiasaan terhadap kegiatan positif. Hal ini dapat didukung melalui sosialisasi

yang dilakukan oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat, atau kelompok-kelompok warga seperti karang taruna dan PKK. Pendidikan yang dilakukan secara berkesinambungan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah.

Di desa seperti Pagar Merbau I, perubahan perilaku dapat didorong melalui kegiatan seperti gotong royong rutin, kampanye kebersihan, lomba lingkungan bersih, serta pelatihan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan dalam masyarakat.

Perubahan perilaku juga harus didukung oleh aturan yang jelas, pemberian insentif kepada warga yang aktif menjaga kebersihan, serta pemberian sanksi sosial bagi mereka yang merusak lingkungan. Dengan begitu, partisipasi masyarakat dalam mengubah perilaku bukan hanya merupakan tanggung jawab sosial, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk keberlanjutan pembangunan desa. Bentuk partisipasi ini selaras dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*) yang menekankan keberlanjutan dan kepemilikan lokal terhadap proses pembangunan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam upaya memahami lebih dalam mengenai peran komunikasi pemerintahan dalam penanganan lingkungan kumuh, peneliti meninjau sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi baik dari segi topik, pendekatan, maupun temuan. Penelitian-penelitian ini menjadi dasar penting untuk mengidentifikasi bagaimana komunikasi pemerintah dapat memengaruhi keberhasilan program penataan permukiman dan pengelolaan lingkungan.

Penelitian terdahulu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun, Metode	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1	Annisa Rahma Hayuningtya, Kualitatif Deskriptif	Strategi Komunikasi Kelurahan Balik Alam untuk Mengatasi Permukiman Kumuh melalui Program KOTAKU di Kabupaten Bengkalis	Kelurahan Balik Alam menggunakan strategi komunikasi bottom-up dengan mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode, dan memilih media seperti WhatsApp,	Perbedaan: penelitian sebelumnya lebih berfokus terhadap strategi yang dilakukan oleh pihak kelurahan sedangkan penelitian ini berfokus pada fungsi dari komunikasi pemerintahan.	Persamaan pada tujuan penelitian yang ingin melihat efektivitas komunikasi dalam proses pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat
2	Atif Rachmat Ramadhan (2020), Kualitatif Deskriptif	Strategi Komunikasi Organisasi Pelaksana Program KOTAKU di Kota Kendari (Studi pada Dinas PUPR Kota Kendari Bidang Cipta Karya)	Dinas PUPR menggunakan strategi komunikasi dengan mengenal sasaran berdasarkan data, menggunakan media seperti spanduk dan media online, serta menyampaikan pesan yang mudah dipahami	Perbedaan: penelitian sebelumnya lebih berfokus terhadap strategi komunikasi pada program KOTAKU sedangkan penelitian ini berfokus pada fungsi dari komunikasi pemerintahan terhadap lingkungan kumuh.	Persamaan: Keduanya sama-sama menyoroti bagaimana peran komunikasi menjadi kunci dalam pelaksanaan program penataan kawasan kumuh, serta melibatkan aktor-aktor pemerintah sebagai informan utama
3	Marisa Intan Lestari (2021) Kualitatif	Implementasi Kebijakan Kota Tanpa Kumuh Pemerintah Kota Bandar Lampung	Pemerintah Kota Bandar Lampung melaksanakan program KOTAKU dengan pendekatan	Perbedaan: penelitian sebelumnya lebih berfokus terhadap kebijakan terhadap	Persamaan: Keduanya menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam menyampaikan

		dalam Persoalan Lingkungan (Studi Kasus di Kelurahan Karang Maritim Panjang)	kolaboratif untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh	lingkungan kumuh sedangkan penelitian ini berfokus pada fungsi dari komunikasi pemerintahan.	informasi, mengedukasi masyarakat, serta membangun partisipasi warga dalam pelaksanaan program.
4	Riki Patullah (2023), kualitatif	Strategi Komunikasi Lingkungan Pemerintah Desa terhadap Keluhan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah (Studi di Desa Simpang Tanjung Kecamatan Belimbing)	Pemerintah desa menggunakan komunikasi edukatif dan persuasif melalui sosialisasi, event edukasi, dan kegiatan door to door untuk mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan air limbah	Perbedaan: penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan air limbah, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada fungsi dari komunikasi pemerintahannya saja.	Persamaan; Keduanya mengkaji bagaimana komunikasi pemerintah desa baik secara informatif, edukatif, persuasi dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan
5	Maya Fitriani (2021), kualitatif	Pengaruh Perilaku Masyarakat terhadap Kondisi Sanitasi Lingkungan Kawasan Kumuh Kota Gorontalo	Perilaku masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi sanitasi lingkungan di kawasan kumuh	Perbedaan: Penelitian ini menyoroti aspek perilaku masyarakat sebagai faktor utama yang berdampak terhadap kondisi sanitasi lingkungan, sedangkan penelitian ini menekankan pada fungsi komunikasi pemerintahan desa dalam menangani lingkungan kumuh.	Persamaan: keduanya menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan kawasan kumuh sangat bergantung pada keterlibatan Masyarakat.

sumber: diolah oleh peneliti 2025

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dari teori yang digunakan dalam penelitian serta hubungannya dengan perumusan masalah. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan, yang memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. Menurut Widayat dan Amirullah (2002) kerangka berpikir atau juga disebut sebagai kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Komunikasi pemerintahan yang efektif melibatkan proses penyampaian informasi secara dua arah antara pemerintah dan masyarakat, baik melalui media formal seperti musyawarah desa, baliho, pengumuman, maupun melalui pendekatan informal seperti tokoh masyarakat, kunjungan langsung, dan forum dialog warga. Pemerintah desa, sebagai ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, memiliki peran strategis dalam menyampaikan program-program penanganan lingkungan kumuh agar dipahami, diterima, dan didukung oleh Masyarakat.

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan adanya permasalahan tata kelola lingkungan yang sudah cukup lama dialami oleh masyarakat Desa, namun hingga saat ini belum ada penanganan dan solusi yang tepat untuk mengatasi

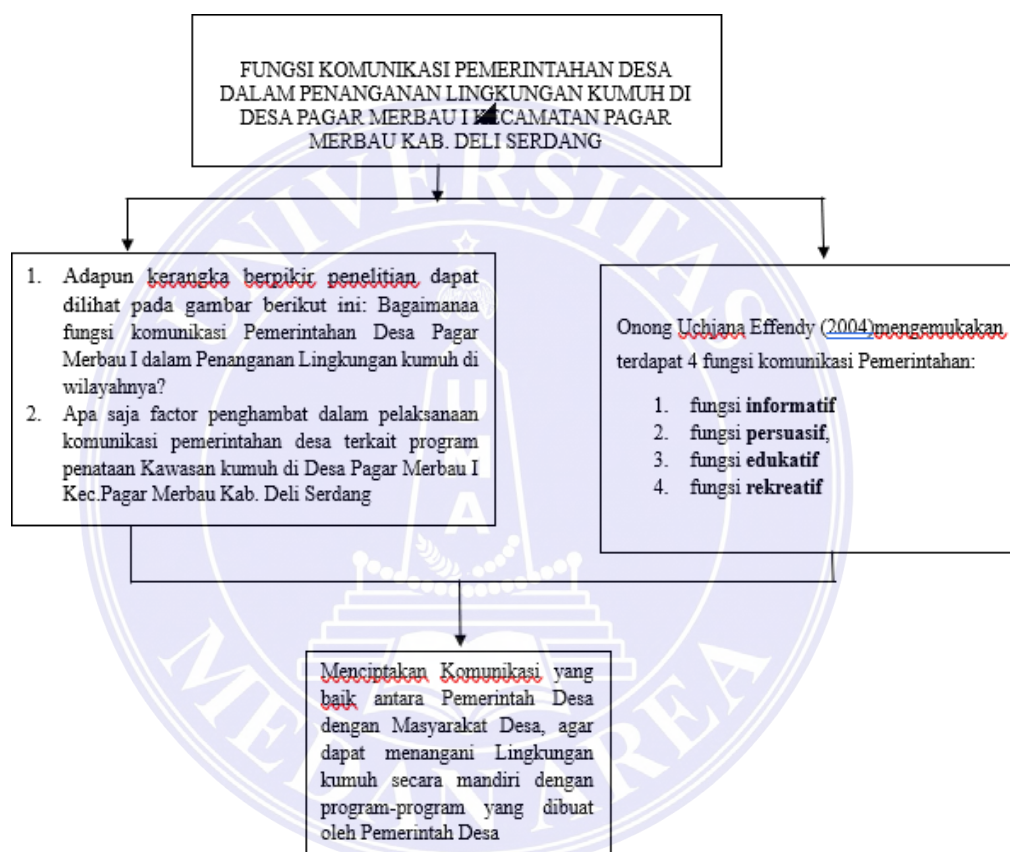
persoalan tersebut, adapun salah satu program Pemerintah Desa Pagar Merbau I sebagai Upaya dalam menangani lingkungan kumuh yaitu dengan melakukan kegiatan gotong royong rutin setiap bulannya, namun upaya tersebut tidak berjalan dan memberikan dampak terhadap lingkungan saat ini diakibatkan karena kurang baiknya komunikasi antara pemerintah Desa dengan masyarakat Dusun.

Penelitian ini menggunakan teori fungsi komunikasi yang dikemukakan oleh Onong Uchjana Effendy (2004) karena teori ini sangat relevan dalam konteks pemerintahan desa yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Fungsi-fungsi yang ada pada teori ini seperti fungsi Pertama, fungsi informatif, yaitu pemerintah berperan sebagai penyampai informasi yang benar, jelas, dan tepat waktu kepada masyarakat, baik mengenai kebijakan, peraturan, program, maupun hal-hal yang menyangkut kepentingan publik. Kedua, fungsi persuasif, yaitu upaya pemerintah membujuk dan mendorong masyarakat agar bersedia menerima, mendukung, serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan atau program pembangunan. Ketiga, fungsi edukatif, di mana komunikasi pemerintahan digunakan sebagai sarana untuk mendidik dan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta keterampilan masyarakat sehingga mampu berperan dalam proses pembangunan. Keempat, fungsi rekreatif, yakni komunikasi yang bertujuan menghibur dan menciptakan suasana yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya mempererat hubungan dan menumbuhkan rasa kebersamaan.. Oleh karena itu, teori ini menjadi dasar yang tepat dalam menganalisis efektivitas komunikasi pemerintahan desa.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ingin mengkaji sejauh mana komunikasi pemerintahan berperan dalam upaya penanganan lingkungan kumuh,

khususnya di Desa Pagar Merbau I, Kecamatan Pagar Merbau. Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi hambatan-hambatan komunikasi serta mencari bentuk komunikasi yang paling efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan menata lingkungan.

Tabel 2. 2 Kerangka Berpikir



sumber: diolah oleh peneliti 2025

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena komunikasi pemerintahan desa dalam konteks penanganan lingkungan kumuh di Desa Pagar Merbau I. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali pengalaman, pandangan, dan interaksi para pelaku pemerintahan desa serta masyarakat yang terlibat secara kontekstual dan holistik.

Pendekatan studi kasus memungkinkan penelitian fokus pada satu lokasi atau objek penelitian secara intensif, yaitu Desa Pagar Merbau I, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai fungsi komunikasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan program penanganan lingkungan kumuh.

Jenis penelitian ini juga memfasilitasi penggunaan teknik pengumpulan data yang beragam seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen resmi desa yang terkait dengan program penanganan lingkungan kumuh. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang kaya dan detail mengenai mekanisme komunikasi serta tantangan yang dihadapi. Jenis penelitian ini tidak bertujuan untuk menghasilkan generalisasi statistik, melainkan pemahaman kontekstual dan deskriptif yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Moleong, 2017). Selain itu, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara statistik atau mencari generalisasi hasil ke populasi yang lebih luas, melainkan untuk memahami konteks sosial, budaya, dan dinamika

komunikasi pemerintahan desa secara mendalam.

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat Deskriptif Kualitatif. Sifat deskriptif berarti penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang terjadi, yaitu fungsi komunikasi pemerintahan desa dalam penanganan lingkungan kumuh di Desa Pagar Merbau I (Sugiyono, 2017). Penelitian deskriptif tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan lebih menitikberatkan pada pemaparan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Sifat kualitatif dalam penelitian ini digunakan karena fokusnya adalah untuk memahami makna, proses, dan interaksi sosial yang terjadi dalam komunikasi pemerintahan desa secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji secara holistik konteks sosial budaya masyarakat desa, serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas komunikasi dalam penanganan lingkungan kumuh (Moleong, 2017).

Selain itu, sifat kualitatif juga memungkinkan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang fleksibel seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen sehingga memperoleh data yang kaya dan beragam (Creswell, 2014).

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Subjek penelitian yang bercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja, subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi selama proses penelitian. Menurut Bungin (2007: 78), Informan penelitian kualitatif adalah subjek yang

memahami informasi objek sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara, informan ini juga diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Rukajar, 2021). Dalam penelitian kualitatif, menurut Bagong, Suyanto (2005) informan terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Informan kunci (*key informan*): mereka yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi.
2. Informan utama: mereka yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari, yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan: mereka yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dan *Snowball Sampling* dalam memilih dan menentukan informan. Yang dimaksud dengan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel data berdasarkan pertimbangan tertentu, di mana individu yang dipilih dianggap memiliki pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian. *Snowball sampling*, di sisi lain,

44 melibatkan sedikit sampel data awal yang kemudian berkembang menjadi jumlah yang lebih besar seiring berjalannya waktu (Sugiyono, 2022).

Selanjutnya dijelaskan bahwa pemilihan informan ke dua dan seterusnya menggunakan teknik *snowball sampling* dapat berdasarkan rekomendasi informasi dari informan pertama, informan ketiga berdasarkan rekomendasi informan kedua dan seterusnya (Heryana, 2015;8).

Peneliti menggunakan *purposive sampling* dan Snowball Sampling karena peneliti ingin lebih memusatkan perhatian pada informan yang memiliki pengetahuan yang spesifik mengenai komunikasi antara pemerintah Desa terhadap penanganan Lingkungan Kumuh di Desa Pagar Merbau I dan membutuhkan rekomendasi informan berikutnya yang memiliki karakteristik maupun pengalaman yang sama dengan informan sebelumnya, sehingga dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, akan membantu peneliti dalam menentukan informan dan membantu peneliti dalam mendapatkan rekomendasi informan yang memiliki pandangan, karakteristik seragam dan memiliki pengetahuan tentang Keadaan Lingkungan sekitar.

Table 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Keterangan	Nama
1	Kepala Desa	1	Informan Kunci	Nani Agustini SP
2	Kepala Dusun	1	Infotman Kunci	Muhammad Arsyad
3	Masyarakat Dusun	3	Informan utama	Prayetno
				Arni
				Sri Astati
4	Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama	2	Informan tambahan	Bambang Kurniawan
				Sarbani
5	Sekretaris Desa	1	Informan tambahan	Syafril

sumber: diolah oleh peneliti 2025

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2016: 308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berpartisipatif (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (Rivki & Bachtiar, 2017).

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara mendalam (*In depth interview*)

Menurut Taylor dan Bogdan (1984) wawancara mendalam ialah temu muka berulang antara peneliti dan subyek penelitian, dalam rangka memahami pandangan subyek penelitian mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri (Saefuddin. M, dkk 2023).

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks. Meskipun demikian, wawancara perlu digunakan dengan berhati-hati dan perlu di triangulasi data dari sumber yang lain (Saroso, 2017:47).

Wawancara dilakukan peneliti dengan alasan agar peneliti mampu mengajukan pertanyaan dengan bertatap muka langsung pada partisipan. Dengan penggunaan teknik wawancara, partisipan juga lebih bisa menyampaikan informasi

secara langsung sehingga peneliti mampu mendapatkan jawaban lebih rinci dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada partisipan.

2. Observasi Peserta (*Participant observation*)

Creswell menyatakan definisi observasi yaitu *Observation is the collection of data through the use of human senses. In some natural conditions, observation is the act of watching social phenomenon in the real world and recording events as they happen* yang artinya yaitu pengumpulan data menggunakan indera yang dimiliki oleh seorang observer dan alat indra dijadikan alat utama dalam melakukan observasi dalam masa saat ini teknologi yang sangat canggih bisa ditambahkan dengan video yang tetap diobservasi oleh indra manusia (Sidiq et al, 2019).

Peneliti harus memahami terlebih dahulu variasi pengamatan dan peran-peran yang dilakukan peneliti (Ulfatin, 2014). Observasi dikatakan pula suatu teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan yang memanfaatkan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan beberapa format observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati (Tiara et al, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil.

3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah kegiatan dimana mengumpulkan data dalam bentuk visual. Menurut (Zuriah, 2009) bahwa dokumentasi merupakan cara

mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jadi dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi sebuah arsip.

Dokumen yang dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode observasi dan wawancara dijadikan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif (Fiantika, 2022)

3.5 Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir (1998: 104) mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna”.

Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan analisis selama proses pengumpulan data dan kemudian melanjutkan analisis setelah data dari lapangan terkumpul. Dan dalam melakukan analisis data, penulis melalui beberapa tahapan- tahapan berikut:

1. Analisis pengumpulan data

Analisis pengumpulan data yang dilakukan penulis pada penelitian ini, yaitu pada data hasil studi pendahuluan (preliminary research) atau data sekunder dengan melakukan pengumpulan informasi tentang objek yang akan diteliti. Data tersebut dapat digunakan untuk menentukan fokus penelitian, meskipun fokus penelitian

tersebut masih bersifat sementara dan dapat berkembang setelah peneliti melakukan penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses dimana penulis melakukan penyederhanaan, merangkum, memilih hal-hal pokok, mengklasifikasikan, memfokuskan pada hal-hal penting dalam tema dan pola yang sama. Data yang telah direduksi akan lebih jelas dalam menggambarkan dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data pada tahapan selanjutnya.

3. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data selanjutnya, penulis menyajikan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan bentuk teks naratif, yang kadang dilengkapi dengan grafik, tabel, bagan (chart) atau sejenisnya.

4. Penarikan Simpulan

Penarikan kesimpulan data atau penarikan intisari merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif. Yang dilakukan penulis dalam hal ini yaitu melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

3.6 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan suatu faktor yang sangat penting, karena akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini ada dua (2) jenis data yang akan dianalisis yaitu, data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Menurut Burhan Bungin (2006:122) data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh peneliti langsung dari sumber informan melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi di Desa Pagar Merbau I.

2. Data Sekunder

Menurut Burhan Bungin (2006:122) sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan, Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, literatur-literatur, dokumen-dokumen, dan arsip-arsip yang di dapatkan Dalam proses komunikasi antara pemerintah Desa pagar merbau I dan Masyarakat.

3.7 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah yang di mana kegiatan penelitian dilakukan, untuk mengumpulkan data yang akurat dan informasi yang relevan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini Peneliti mengambil Lokasi di Dusun I Desa Pagar Merbau I Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.

Adapun jadwal penelitian yang dilakukan penulis yaitu sejak bulan Mei s/d selesai 2025.

Table 3.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																											
		April 2025				Mei 2025				Juni 2025				Juli 2025				Agustus 2025				September 2025				Oktober 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																												
2	Penyusunan Proposal																												
3	Bimbingan dan Perbaikan Proposal																												
4	Seminar Proposal																												
5	Revisi Proposal																												
6	Observasi lapangan dan wawancara																												
7	Penyusunan Bab IV-V																												
8	Seminar Hasil																												
9	Bimbingan dan Perbaikan																												
10	Pengajuan Berkas Meja Hijau																												
11	Sidang Skripsi																												

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

2.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fungsi komunikasi pemerintahan desa dalam penanganan lingkungan kumuh di Desa Pagar Merbau I, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi komunikasi pemerintahan Desa Pagar Merbau I dalam penanganan lingkungan kumuh telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Pemerintah Desa Pagar Merbau I telah menjalankan fungsi komunikasi pemerintahan dalam penanganan lingkungan kumuh melalui beberapa bentuk komunikasi, seperti fungsi informatif dengan menyampaikan informasi mengenai kegiatan kebersihan lingkungan dan gotong royong, fungsi edukatif melalui sosialisasi dan imbauan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta fungsi persuasif dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan penataan lingkungan. Namun, pelaksanaan komunikasi tersebut masih cenderung bersifat formal dan satu arah, sehingga pesan yang disampaikan belum sepenuhnya dipahami dan diinternalisasi oleh seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih rendah dan belum terjadi perubahan perilaku masyarakat secara konsisten dalam mendukung penanganan lingkungan kumuh di Desa Pagar Merbau I.

2. Terdapat berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaan komunikasi pemerintahan desa terkait penanganan lingkungan kumuh. Faktor-faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain belum optimalnya penerapan fungsi rekreatif dalam komunikasi pemerintahan desa, sehingga pesan-pesan lingkungan kurang menarik minat masyarakat. Selain itu, keterbatasan anggaran desa menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi yang bersifat kreatif dan inovatif. Dominannya pendekatan komunikasi formal juga menyebabkan rendahnya kedekatan emosional antara pemerintah desa dan masyarakat. Di sisi lain, rendahnya kesadaran dan antusiasme masyarakat terhadap isu lingkungan turut menghambat efektivitas komunikasi pemerintahan desa. Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan berdampak pada belum optimalnya upaya penanganan lingkungan kumuh di Desa Pagar Merbau I.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai fungsi komunikasi pemerintahan desa dalam penanganan lingkungan kumuh di Desa Pagar Merbau I, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan agar pelaksanaan program penataan lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan yaitu:

1. Pemerintah Desa Pagar Merbau I disarankan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas fungsi komunikasi pemerintahan dalam penanganan lingkungan kumuh. Pemerintah desa perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih partisipatif dan berkelanjutan, dengan tidak hanya mengandalkan komunikasi yang bersifat informatif dan

persuasif, tetapi juga memperkuat fungsi edukatif dan rekreatif. Komunikasi yang dikemas secara kreatif, seperti melalui kegiatan sosial, budaya, atau lomba kebersihan lingkungan, diharapkan mampu menarik minat masyarakat dan menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, pemerintah desa juga perlu membangun komunikasi dua arah yang lebih terbuka agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, serta ide-ide terkait penanganan lingkungan kumuh.

2. Pemerintah desa perlu melakukan upaya strategis untuk mengatasi faktor-faktor penghambat komunikasi pemerintahan desa. Pemerintah desa disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat, seperti media sosial desa, grup komunikasi warga, serta peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai perantara pesan komunikasi. Di samping itu, meskipun terdapat keterbatasan anggaran, pemerintah desa dapat memaksimalkan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan masyarakat dan lembaga desa lainnya. Dengan mengatasi hambatan-hambatan komunikasi tersebut secara bertahap dan berkelanjutan, diharapkan upaya penanganan lingkungan kumuh di Desa Pagar Merbau I dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bauman, J. F. (1987). *Public Housing, Race, and Renewal: Urban Planning in Philadelphia, 1920–1974*. Philadelphia: Temple University Press.
- Beinart, W., & Dubow, S. (Eds.). (2013). *Segregation and apartheid in twentieth century South Africa* (hlm. 25–35). Routledge.
- Cheru, F. (2005). *Globalisasi dan pembangunan yang tidak merata di Afrika: The limits to effective urban governance in the provision of basic services*. UCLA Globalization Research Center–Africa.
- Irawan, W., Mulyanto, D., Dewi, K. R., Listalatu, A., Farahdiba, A., & Falah, D. (2008). *Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Permukiman dan Perumahan, BAPPENAS. hlm. 45.
- Ardianto, E. (2014). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Cangara, H. (2014). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendy, O. U. (2007). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mulyana, D. (2010). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Wursanto. (2003). *Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

- Alonso-Villar, O. (2001). Large Metropolises in the Third World: An Explanation. *Urban Studies*, 38(8), 1368. <https://doi.org/10.1080/00420980120061070>.
- Bolay, J.-C. (2006). Slums and urban development: Questions on society and globalisation. *The European Journal of Development Research*, 18(2).

<https://doi.org/10.1080/09578810600709492>

- Clonts, H. A. (1970). Influence of urbanization on land values at the urban periphery. *Land Economic* 46(4). <https://doi.org/10.2307/3145522>
- Craster, C. V. (1944). Slum Clearance: The Newark Plan. *American Journal of Public Health and the Nation's Health*, 34(9), 935–940. <https://doi.org/10.2105/ajph.34.9.935>
- Firdaus, G. (2012). Urbanization, emerging slums and increasing health problems: A challenge before the nation: An empirical study with reference to state of Uttar Pradesh in India. *Journal of Environmental Research and Management*, 3(9), 146–152.
- Griffin, E., & Ford, L. (1980). A model of Latin American city structure. *Geographical Review*, 397–422.
- Hammel, E. A. (1964). Some characteristics of rural village and urban slum populations on the coast of Peru. *Southwestern Journal of Anthropology*, 20(4). <https://doi.org/10.1086/soutjanth.20.4.3629175>
- Nijman, J. (2010). A Study of Space in Mumbai's Slums. *Tijdschrift voor economische en sociale geografie*, 101(1), 4–17.
- Bigon, L. (2008). Between Local and Colonial Perceptions: The History of Slum Clearances in Lagos (Nigeria), 1924–1960. *African and Asian Studies*, 7(1), 49–76.
- Aminah, S. (2016). Komunikasi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 112–121.
- Fauzi, M. (2018). Peran Pemerintah Desa dalam Penataan Lingkungan Permukiman. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 6(1), 55–66.
- Harahap, R. & Lubis, F. (2020). Strategi Komunikasi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(2), 98–110.
- Lubis, A. (2019). Hambatan Komunikasi Pemerintahan di Tingkat Desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 45–57.
- Siregar, N. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 9(3), 150–162.

Artikel dan lainnya

- Ali, M. A., & Toran, K. (2004). Migration, Slums and Urban Squalor – A case study of Gandhinagar Slum. *Proceedings of the Third International Conference*

on Environment and Health.

Amiruddin, F. (2021, April 3). Akses Menuju Rumah Diblokir Tetangga, Warga Pangandaran Ini Kebingungan. *Detiknews*. Diakses pada 25 Desember 2023, dari <https://news.detik.com/>

Department for Infrastructure and Economic Cooperation. (2011). *The Informal Economy: Fact Finding Study* [PDF]. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 Oktober 2011. Diakses pada 20 November 2011.

IRIN, United Nations News Service. (2009, Juni 11). *Africa: Improved Infrastructure Key to Slum Upgrading - UN Official*. Diarsipkan 21 Oktober 2013 di Wayback Machine.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, World Bank, & AIIB. (n.d.). *Project Completion Report* [kotaku.pu.go.id]. Jakarta: Kementerian PUPR. hlm. 4–5.

Korps Medis Internasional. (2011, Juli 28). *Korps Medis Internasional - Korps Medis Internasional*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 Juli 2011. Diakses pada 23 Juli 2015.

Participating Countries. (2009, Januari 14). Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 Januari 2009. Diakses pada 21 Januari 2009.

What is Urban Upgrading? (2021). *What is Urban Upgrading? Reference for administrator, policy maker, and decision makers*. Diakses pada 25 Desember 2023.

Kementerian PUPR. (2016). *Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (KOTAKU)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. (2022). *Profil Kecamatan Pagar Merbau*. Dinas Kominfo Kabupaten Deli Serdang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Barros, G. (2008). *Brazil: Tantangan untuk menjadi negara adidaya pertanian*. Brookings Institution. Diarsipkan pada 23 Oktober 2013 di Wayback

Machine.

Yardley, J. (2011, 28 Desember). *Dalam satu kawasan kumuh, kesengsaraan, pekerjaan, politik, dan harapan*. *New York Times*. Diarsipkan pada 8 Januari 2015 di Wayback Machine.

Destroying Makoko. (2012, 18 Agustus). *The Economist*. Diarsipkan pada 4 September 2013 di Wayback Machine.

Kuiper, M., & van der Ree, K. (2006). *Growing Out of Poverty: Urban Job Creation and the Millennium Development Goals*. *Global Urban*

Development Magazine, 2(1), Maret 2006. Diarsipkan 31 Oktober 2019 di Wayback Machine.

Sturgis, S. (2013, 3 Januari). *In Nairobi's slums, problems and potential as big as Africa itself*. Rockefeller Foundation. Diarsipkan 9 Januari 2015 di Wayback Machine.

"Salinan yang diarsipkan" (2013). *Databook_29.pdf*. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 24 Oktober 2013. Diakses tanggal 16 September 2013.

Esen, O. (2009). *Istanbul's Gecekondus*. London School of Economics and Political Science. Diarsipkan 22 Oktober 2013 di Wayback Machine.

Baker, J. (2008). *Kemiskinan di Perkotaan - Gambaran Umum*. The World Bank.

Kurniawan, R. (2019, 13 Desember). *Pengusuran Tamansari untuk Penataan Kawasan Kumuh*. *Medcom.id*. Diakses 25 Desember 2015.

Silva, E. (2011). *Latin American Slum Upgrading Efforts*. Arthur Wheelwright Traveling Fellowship, Universitas Harvard. Diarsipkan 21 Oktober 2013 di Wayback Machine.

Effendy, O. U. (2003). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Effendy, O. U. (2004). *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Hardjana, A. M. (2007). *Komunikasi Pemerintahan: Strategi Mengelola Krisis dan Reformasi*. Yogyakarta: Kanisius.

Kusnadi, E. (2018). *Komunikasi Pemerintahan dan Partisipasi Publik*. Jakarta: Prenada Media Group.

Lasswell, H. D. (1948). *The Structure and Function of Communication in Society*. New York: Institute for Religious and Social Studies.

Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2011). *Theories of Human Communication* (10th ed.). Long Grove, IL: Waveland Press.

- Mulyana, D. (2005). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Z. (2019). *Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Medan: Perdana Publishing.
- Rakhmat, J. (2008). *Psikologi Komunikasi* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rogers, E. M., & Shoemaker, F. F. (1971). *Communication of Innovations: A Cross- Cultural Approach*. New York: The Free Press.
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of Innovations* (3rd ed.). New York: The Free Press.
- Sastropetro, S. (1990). *Komunikasi Sosial dan Pembangunan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto. (2015). *Komunikasi Pemerintahan: Konsep dan Praktik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Wiryanto. (2006). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Grasind

Lampiran I Surat Permohonan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kotan Nasir I Medan Estate ☎ (061) 7360158, 7360848, 7364348 ✉ (061) 7366112 Medan 20223
Kampus II : Jalan Gelumbang Marcor 70 / Jalan Sei Saraya Hamor 70 A ☎ (061) 8229909 ✉ (061) 8220331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: info.medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2229 / FTS.IV01.10/X/2025
Tempat :
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Medan, 22 September 2025

Kepada Yth,
Kepala Desa Pagar Merbau I, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang

Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Chalirah Sapitra
N P M : 228510011
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Seat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Desa Pagar Merbau I, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

"Fungsi Komunikasi Pemerintahan Desa dalam Penanganan Lingkungan Rumah di Desa Pagar Merbau I, Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Walid Musihafa S., S.Sos, M.P.P.

Tembusan:
1. Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



Lampiran II Surat Selesai



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PAGAR MERBAU
DESA PAGAR MERBAU I
Kode Pos 20551

SURAT KETERANGAN
Nomor : 190.1/2006/PM I/XI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: NANI AGUSTINI, SP
Jabatan	: Kepala Desa Pagar Merbau I

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama	: CHALIZAH SAPITRA
NIM	: 228510011
Prodi	: Ilmu Pemerintahan
Universitas	: Universitas Medan Area

Telah selesai melakukan Penelitian Pengambilan Data/Riset untuk keperluan Penelitian Penyusunan Skripsi sebagai syarat ujian pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area di Kantor Desa Pagar Merbau I Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang dengan judul " Fungsi Komunikasi Pemerintahan Desa dalam Penanganan Lingkungan Kumuh di Desa Pagar Merbau I Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang" selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 04 Nopember s/d 28 Nopember 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya, dan diucapkan terima kasih.

Pagar Merbau I, 03 Nopember 2025.
KEPALA DESA PAGAR MERBAU I
KECAMATAN PAGAR MERBAU



Lampiran III Lokasi Penelitian



Lampiran IV Dokumentasi



Wawancara dengan Masyarakat



Lampiran V Wawancara Peneliti

Informan Kunci

A. Identitas Responden

Nama : Nani agustini
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 49 Tahun
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Desa

B. Pertanyaan

1. Bagaimana pemerintah desa menyampaikan informasi terkait program kebersihan lingkungan kepada masyarakat?

Jawaban:

Pemerintah desa menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia di desa. Informasi biasanya disampaikan melalui rapat desa, musyawarah dusun, pengumuman di masjid, serta pemberitahuan langsung oleh kepala dusun kepada warga. Selain itu, pemerintah desa juga menggunakan pengeras suara masjid untuk mengumumkan jadwal gotong royong dan kegiatan kebersihan lingkungan. Informasi yang disampaikan meliputi jadwal kegiatan, pentingnya menjaga kebersihan, larangan membuang sampah sembarangan, serta ajakan untuk berpartisipasi dalam penataan lingkungan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, karena tidak semua masyarakat menghadiri rapat atau memperhatikan pengumuman. Hal ini menyebabkan sebagian warga kurang memahami informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa.

2. Apa saja bentuk kegiatan komunikasi yang dilakukan pemerintah desa dalam penanganan lingkungan kumuh?

Jawaban:

Pemerintah desa melakukan berbagai bentuk komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi langsung dilakukan

melalui sosialisasi, rapat desa, gotong royong, dan pertemuan warga. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah desa memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dampak lingkungan kumuh terhadap kesehatan, serta cara mengelola sampah rumah tangga dengan baik. Selain itu, komunikasi persuasif juga dilakukan dengan cara mengajak masyarakat secara langsung untuk ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Pemerintah 108 desa berusaha memberikan contoh dengan turut hadir dalam kegiatan tersebut agar masyarakat lebih termotivasi untuk berpartisipasi.

3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanganan lingkungan kumuh?

Jawaban:

Partisipasi masyarakat masih tergolong rendah dan belum merata. Sebagian masyarakat sudah menunjukkan kepedulian dengan mengikuti kegiatan gotong royong dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumahnya. Namun, masih ada masyarakat yang kurang peduli dan menganggap kebersihan lingkungan sebagai tanggung jawab pemerintah desa semata. Kurangnya kesadaran masyarakat ini menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah desa. Meskipun informasi dan imbauan sudah disampaikan, perubahan perilaku masyarakat belum terjadi secara konsisten.

4. Apakah pesan yang disampaikan pemerintah desa sudah dipahami dengan baik oleh masyarakat?

Jawaban:

Belum sepenuhnya. Pesan yang disampaikan pemerintah desa seringkali bersifat formal dan satu arah, sehingga masyarakat hanya menerima informasi tanpa adanya dialog atau umpan balik. Akibatnya, sebagian masyarakat belum memahami secara mendalam pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, perbedaan tingkat pendidikan dan kesibukan masyarakat juga mempengaruhi tingkat pemahaman mereka terhadap pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih sederhana,

menarik, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

5. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan komunikasi terkait penanganan lingkungan kumuh?

Jawaban:

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran desa untuk kegiatan sosialisasi yang lebih kreatif dan inovatif, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola komunikasi yang efektif. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan menjadi hambatan utama. Pendekatan komunikasi yang masih bersifat formal juga menyebabkan kurangnya kedekatan emosional antara pemerintah desa 109 dan masyarakat. Hal ini membuat pesan yang disampaikan kurang menarik dan tidak mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat secara signifikan.

Informan Utama

- A. Nama : Muhammad Arsyad
Jenis Kelamin : Laki-laki Umur : 29 Tahun
Jabatan : Kepala Dusun I Desa Pagar Merbau I

Daftar Pertanyaan dan Jawaban

1. Bagaimana cara pemerintah desa menyampaikan informasi kebersihan lingkungan kepada warga dusun?

Jawaban:

Sebagai kepala dusun, saya menyampaikan informasi dari pemerintah desa secara langsung kepada warga melalui pertemuan dusun, pengumuman setelah kegiatan keagamaan, serta pemberitahuan dari rumah ke rumah apabila informasinya dianggap penting. Biasanya informasi yang disampaikan berkaitan dengan jadwal gotong royong, larangan membuang sampah sembarangan, serta ajakan menjaga

kebersihan lingkungan. Namun, tidak semua warga dapat dijangkau secara bersamaan karena kesibukan mereka bekerja. Oleh sebab itu, penyampaian informasi sering dilakukan berulang-ulang agar seluruh warga mengetahui dan memahami pesan yang disampaikan.

2. Bagaimana respon masyarakat terhadap ajakan gotong royong dan kebersihan lingkungan?

Jawaban:

Respon masyarakat beragam. Sebagian warga menunjukkan kepedulian dengan hadir dalam kegiatan gotong royong dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumahnya. Namun, masih ada warga yang kurang peduli dan jarang berpartisipasi. Beberapa warga beralasan sibuk bekerja, sementara yang lain masih menganggap kebersihan lingkungan sebagai tanggung jawab pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui komunikasi yang lebih intensif dan pendekatan yang lebih persuasif.

3. Apa kendala yang dihadapi dalam menyampaikan pesan kebersihan lingkungan kepada masyarakat?

Jawaban:

Kendala utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu, perbedaan tingkat pendidikan dan pemahaman 110 warga juga mempengaruhi penerimaan pesan yang disampaikan. Ada warga yang langsung memahami dan melaksanakan, tetapi ada juga yang kurang peduli. Keterbatasan fasilitas pendukung seperti tempat pembuangan sampah yang memadai juga menjadi kendala, sehingga masyarakat terkadang membuang sampah sembarangan karena tidak tersedia sarana yang cukup.

4. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat?

Jawaban:

Kami berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan pendekatan secara personal, memberikan contoh langsung, serta melibatkan tokoh masyarakat dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Dengan adanya keterlibatan tokoh masyarakat, warga menjadi lebih termotivasi untuk ikut serta. Selain itu, kami juga berusaha menciptakan suasana gotong royong yang lebih kebersamaan agar masyarakat merasa kegiatan tersebut bukan sekadar kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan bersama.

B. Nama : Sri Astati
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat: : Dusun I Desa Pagar Merbau I

Daftar Pertanyaan dan Jawaban

1. Apakah Anda mengetahui program pemerintah desa terkait kebersihan lingkungan?

Jawaban:

Ya, saya mengetahui program kebersihan lingkungan dari pengumuman kepala dusun dan pengeras suara masjid. Biasanya informasi yang disampaikan berkaitan dengan jadwal gotong royong dan imbauan menjaga kebersihan lingkungan. Namun, terkadang informasi tersebut tidak disampaikan secara rinci, sehingga sebagian warga hanya mengetahui jadwal kegiatan tanpa memahami tujuan dan manfaat dari kegiatan tersebut.

2. Bagaimana pendapat Anda tentang kondisi lingkungan di Dusun I?

Jawaban:

Menurut saya, kondisi lingkungan di Dusun I masih perlu banyak

perbaikan. Masih terdapat sampah di beberapa titik dan saluran drainase yang kurang terawat. Hal ini membuat lingkungan terlihat kurang bersih dan berpotensi menimbulkan masalah Kesehatan. Walaupun pemerintah desa sudah berupaya mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan, kesadaran sebagian warga masih rendah sehingga kondisi lingkungan belum mengalami perubahan yang signifikan.

3. Apakah Anda ikut serta dalam kegiatan gotong royong yang diadakan pemerintah desa?

Jawaban:

Saya berusaha ikut serta dalam kegiatan gotong royong jika tidak ada pekerjaan mendesak di rumah. Menurut saya, kegiatan tersebut sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mempererat hubungan antarwarga. Namun, saya melihat masih banyak warga yang tidak ikut serta, sehingga pekerjaan menjadi lebih berat bagi warga yang hadir. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan.

4. Menurut Anda, apa yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat?

Jawaban:

Menurut saya, salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, kesibukan bekerja juga menjadi alasan sebagian warga tidak ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Di sisi lain, kurangnya sanksi atau aturan yang tegas juga membuat sebagian warga tidak merasa berkewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Informan Tambahan

A. Nama : Sarbani

Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 55 Tahun
Jabatan : Tokoh Masyarakat Dusun I

Daftar Pertanyaan dan Jawaban

1. Bagaimana Anda melihat peran pemerintah desa dalam menyampaikan informasi tentang kebersihan lingkungan?

Jawaban:

Menurut saya, pemerintah desa sudah berupaya menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai cara, seperti rapat desa, pengumuman di masjid, dan melalui kepala dusun. Informasi yang disampaikan biasanya berkaitan dengan jadwal gotong royong, ajakan menjaga kebersihan lingkungan, serta larangan membuang sampah sembarangan. Namun, penyampaian informasi tersebut masih belum menjangkau seluruh masyarakat secara efektif. Masih ada warga yang tidak mengetahui informasi karena tidak hadir dalam rapat atau kurang memperhatikan pengumuman. Oleh karena itu, diperlukan metode komunikasi yang lebih variatif dan menarik agar pesan dapat diterima oleh semua lapisan Masyarakat.

2. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan?

Jawaban:

Kesadaran masyarakat masih tergolong rendah. Sebagian warga sudah memahami pentingnya kebersihan lingkungan dan berusaha menjaga kebersihan di sekitar rumahnya. Namun, masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan kurang peduli terhadap kondisi lingkungan. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan yang sudah berlangsung lama serta kurangnya pemahaman tentang dampak lingkungan kumuh terhadap kesehatan dan kenyamanan hidup. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat dapat mengubah perilaku mereka.

3. Apa yang menjadi hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?

Jawaban:

Hambatan utama adalah kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab bersama terhadap kebersihan lingkungan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa kebersihan lingkungan adalah tugas pemerintah desa semata. Selain itu, kesibukan masyarakat dalam bekerja juga menjadi faktor penghambat. Banyak warga yang tidak dapat mengikuti kegiatan gotong royong karena harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya strategi komunikasi yang mampu menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama.

4. Menurut Anda, apa yang perlu dilakukan pemerintah desa agar komunikasi lebih efektif?

Jawaban:

Pemerintah desa perlu menggunakan pendekatan yang lebih persuasif dan melibatkan tokoh masyarakat serta tokoh agama dalam menyampaikan pesan. Dengan melibatkan tokoh yang dihormati masyarakat, pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima. Selain itu, kegiatan yang bersifat rekreatif dan edukatif juga perlu dilakukan agar masyarakat lebih tertarik untuk berpartisipasi. Misalnya, lomba kebersihan lingkungan atau kegiatan gotong royong yang disertai kegiatan kebersamaan.

B. Nama : Prayetno
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 47 Tahun
Jabatan : Masyarakat

Daftar Pertanyaan dan Jawaban

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mengkomunikasikan program penanganan lingkungan kumuh?

Jawaban:

Pemerintah desa telah menjalankan perannya dalam mengkomunikasikan program penanganan lingkungan kumuh melalui berbagai forum, seperti musyawarah desa, pertemuan warga, dan koordinasi dengan perangkat desa. Informasi yang disampaikan mencakup rencana kegiatan kebersihan, ajakan gotong royong, serta pentingnya menjaga lingkungan. Namun, komunikasi yang dilakukan masih bersifat formal dan belum sepenuhnya mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih inovatif dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.

2. Apakah komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat sudah berjalan efektif?

Jawaban:

Komunikasi sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Meskipun informasi telah disampaikan, tidak semua masyarakat merespon dengan tindakan nyata. Efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti metode penyampaian pesan, tingkat pemahaman masyarakat, serta keterbatasan fasilitas pendukung. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap strategi komunikasi yang digunakan.

3. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan komunikasi pemerintahan desa?

Jawaban:

Faktor penghambat antara lain keterbatasan anggaran desa untuk kegiatan sosialisasi yang lebih kreatif, kurangnya media komunikasi yang efektif, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, pendekatan komunikasi yang masih bersifat satu arah menyebabkan masyarakat kurang terlibat secara aktif. Keterbatasan fasilitas seperti

tempat pembuangan sampah juga menjadi kendala, karena masyarakat tidak memiliki sarana yang memadai untuk mengelola sampah.

4. Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektivitas komunikasi pemerintahan desa?

Jawaban:

Saya merekomendasikan agar pemerintah desa mengembangkan strategi komunikasi yang lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan program. Selain itu, penggunaan media sosial dan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kegiatan 114 edukatif yang dikemas secara menarik dan rekreatif juga perlu dilakukan agar masyarakat lebih termotivasi untuk menjaga kebersihan lingkungan.

